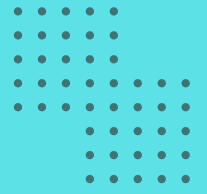




**BANK TRITUNGGAL**  
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TRITUNGGAL

# LAPORAN TRANSPARANSI



**PELAKSANAAN TATA KELOLA**



**2  
0  
2  
5**

**A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)  
ATAS PENERAPAN TATA KELOLA**

<b>Alamat</b>	JL.MT.Haryono No.07 Sintang
<b>Nomor Telepon</b>	082153161550
<b>Penjelasan Umum</b>	<p>PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tritunggal, yang didirikan pada tahun 2013 dan berlokasi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Penerapan GCG di BPR Tritunggal mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hal ini sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola. Selain itu, BPR Tritunggal aktif dalam menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada OJK dan asosiasi terkait, seperti Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), guna memastikan transparansi dan akuntabilitas operasional. Dengan penerapan GCG yang konsisten, BPR Tritunggal berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyediaan layanan keuangan yang terpercaya.</p>
<b>Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola</b>	2
<b>Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola</b>	<p>Berdasarkan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Yang Dikaitkan Predikat Komposit Mendapatkan Peringkat 2 Yaitu, Manajemen BPR Telah Melakukan Penerapan Tata Kelola Yang Secara Umum Baik. Hal Ini Tercermin Dari Pemenuhan Yang Memadai Atas Prinsip Tata Kelola. Dalam Hal Ini Terdapat Kelemahan Penerapan Prinsip Tata Kelola, Secara Umum Kelemahan Tersebut Kurang Signifikan Dan Dapat Diselesaikan Dengan Tindakan Normal Oleh Manajemen BPR.</p>

## B.PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

### 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	NIK :6105015610950001
	Nama : Yenni Tresnawati
	Jabatan :Direktur Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjadi Koordinator dan Ketua Komite Kredit</li><li>2. Mengendalikan Funding dan Lending</li><li>3. Menyusun dan melaksanakan rencana strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang yang mencakup: tujuan dan nilai-nilai, visi dan misi, sasaran, strategi bisnis, RBB, membuat prediksi tentang kondisi lingkungan mikro maupun makro yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kerja, analisis persaingan besar.</li><li>4. Mengusulkan Rencana Strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RUPS maupun diluar RUPS.</li><li>5. Memberikan usul pada Dewan Komisaris tentang Rancangan Anggaran dan Rencana Kerja dan Unit Bisnis Strategis lain yang dipimpinnya untuk disahkan pada RUPS.</li><li>6. Memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi bulanan berkaitan dengan kinerja setiap unit kerja yang dipimpinnya.</li><li>7. Memberikan tugas, arahan, dan bimbingan terhadap staff dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan.</li><li>8. Membuat laporan secara periodik kepada/bagi pihak-pihak yang berkepentingan.</li><li>9. Membina dan menjaga hubungan baik/kerja sama secara positif dengan lembaga lain yang terkait, baik pemerintah ataupun non-pemerintah.</li><li>10. Pencapaian tingkat kesehatan bank yang sehat dan wajar</li><li>11. Upaya mengoptimalkan laba bank</li><li>12. Menjaga dan memastikan agar BPR yang dipimpin dapat mencapai target yang diberikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang mencakup pendanaan, kredit, jasa, hasil usaha dan kualitas aktiva produktif.</li><li>13. Melakukan kegiatan pemupukan dan dan pemasaran kredit.</li><li>14. Mengarahkan dan mendorong staffnya untuk memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh nasabah sesuai dengan sistim dan prosedur yang berlaku.</li><li>15. Mengembangkan kemampuan diri maupun staff yang dipimpinnya melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan yang terencana.</li><li>16. Menegakkan disiplin dan meningkatkan dedikasi karyawan dengan memberikan tauladan yang baik dalam segala aspek pekerjaan.</li><li>17. Menjamin bahwa laporan kepada Dewan Pengawas telah benar dan dikirim tepat waktu.</li></ol>

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Direksi telah melakukan persiapan implementasi SAKEP dan perhitungan CKPN dengan melakukan penyesuaian sistem serta koordinasi internal terkait metode perhitungan yang akan digunakan. Selain itu, proses audit oleh KAP telah berjalan dan Direksi telah melakukan komunikasi serta menyiapkan dokumen pendukung untuk mempercepat penyelesaian audit dan pelaporannya kepada OJK. Terkait pengunduran diri Direktur Utama, Direksi telah melaksanakan proses serah terima jabatan, melakukan penonaktifan akses yang bersangkutan, serta menyiapkan dan/atau menyampaikan pelaporan kepada OJK. Direksi juga sedang dalam proses pengisian jabatan yang kosong, termasuk penjajakan kandidat untuk posisi Direktur Operasional dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan, dan PE Audit Internal. Dalam aspek SDM, Direksi telah melakukan evaluasi kebutuhan pegawai dan mulai melengkapi struktur organisasi serta mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan internal maupun eksternal guna meningkatkan kompetensi. Direksi juga telah menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran BMPK sesuai komitmen dengan OJK, serta melakukan upaya perbaikan kualitas kredit melalui peningkatan monitoring dan penagihan guna menekan NPL. Di sisi lain, upaya peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga terus dilakukan melalui strategi pemasaran dan program internal. Selain itu, Direksi telah memenuhi kewajiban pelaporan SLIK, menindaklanjuti hasil audit dan pengawasan sebelumnya, serta mulai menyusun rencana kerja tahun 2026 dan laporan kinerja semester II 2025. Penguatan permodalan juga dilakukan melalui pengelolaan laba dan efisiensi operasional.

## 2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	NIK :6105011909780003 Nama :Lukas Jabatan :Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemilik/RUPS, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR. 2. Pengawasan dilakukan Dewan Komisaris untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi BPR sesuai Job Desc masing-masing dan Tata Tertib Direksi, 3. Pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar BPR;

4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (2) dilakukan secara :
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
  - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
5. Melaksanakan pengawasan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
6. Mengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas;
7. Menyetujui Rencana Bisnis BPR (RBB) setiap tahun dan melakukan evaluasi pengawasan realisasi RBB setiap semester,
8. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan dan menjaga kelangsungan BPR.
9. Menyetujui atau menolak pemberian fasilitas kredit kepada pihak terafiliasi sesuai Peraturan BPR terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),
10. Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Audit (LHA) oleh Auditor Intern, OJK dan KAP secara berkala dan memonitor tindak lanjut Direksi atas penyelesaian LHA.
11. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Komisaris mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan BPR
  - b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan BPR;
  - c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan BPR;
  - d. pembinaan dan pengembangan BPR
12. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Komisaris;
13. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS;
14. memimpin rapat Dewan Komisaris;
15. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Komisaris.

2

NIK :6103010806780001

Nama :Aliudin

Jabatan :Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemilik/RUPS, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR,
2. Pengawasan dilakukan Dewan Komisaris untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi BPR sesuai Job Desc masing2 dan Tata Tertib Direksi,
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar BPR;
4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (2) dilakukan secara :
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
  - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
5. Melaksanakan pengawasan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR

6. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas;
7. Menyetujui Rencana Bisnis BPR (RBB) setiap tahun dan melakukan evaluasi pengawasan realisasi RBB setiap semester,
8. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan dan menjaga kelangsungan BPR.
9. Menyetujui atau menolak pemberian fasilitas kredit kepada pihak terafiliasi sesuai Peraturan BPR terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),
10. Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Audit (LHA) oleh Auditor Intern, OJK dan KAP secara berkala dan memonitor tindak lanjut Direksi atas penyelesaian LHA.
11. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Komisaris mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan BPR
  - b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan BPR;
  - c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan BPR ;
  - d. pembinaan dan pengembangan BPR
12. membantu Ketua Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS;
13. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisaris.

Rekomendasi kepada Direksi:

Dewan Komisaris menekankan agar Direksi segera memastikan kesiapan implementasi SAKEP dan perhitungan CKPN mulai Januari 2025 dengan didukung sistem, sarana, dan metode yang memadai. Direksi juga diminta mempercepat proses audit oleh KAP serta menindaklanjuti dan melaporkan hasilnya kepada OJK secara tepat waktu. Terkait pengunduran diri Direktur Utama, Direksi harus melakukan serah terima jabatan secara menyeluruh, memastikan tidak ada akses yang tersisa, serta menyampaikan pelaporan resmi kepada OJK. Selain itu, Direksi perlu segera mengisi kekosongan jabatan strategis seperti Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan PE Audit Internal. Dalam aspek SDM, Direksi diminta melengkapi struktur organisasi serta meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan internal maupun eksternal. Dari sisi operasional, Direksi harus menyelesaikan pelanggaran BMPK sesuai komitmen dengan OJK, meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit guna menekan NPL, serta mengoptimalkan penghimpunan dana pihak ketiga. Direksi juga diwajibkan memenuhi kewajiban SLIK, menindaklanjuti hasil audit dan pengawasan, serta menyusun rencana kerja tahun 2026 dan laporan kinerja semester II 2025. Di sisi lain, penguatan permodalan perlu dilakukan melalui optimalisasi laba dan pengelolaan keuangan yang baik. Terakhir, Direksi diingatkan bahwa pencapaian target NPL menjadi faktor penting dalam pemberian tantiem dan jasa produksi, sehingga diperlukan fokus pada penyelesaian kredit bermasalah serta peningkatan kinerja secara keseluruhan.

### 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Tidak Ada
	Program Kerja	:	Tidak Ada
	Realisasi	:	Tidak Ada
	Jumlah Rapat	:	Tidak Ada
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Tidak Ada
	Program Kerja	:	Tidak Ada
	Realisasi	:	Tidak Ada
	Jumlah Rapat	:	Tidak Ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Tidak Ada
	Program Kerja	:	Tidak Ada
	Realisasi	:	Tidak Ada
	Jumlah Rapat	:	Tidak Ada
4.	Komite Manajemen Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Tidak Ada
	Program Kerja	:	Tidak Ada
	Realisasi	:	Tidak Ada
	Jumlah Rapat	:	Tidak Ada
5.	Komite Lainnya		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Tidak Ada
	Program Kerja	:	Tidak Ada
	Realisasi	:	Tidak Ada
	Jumlah Rapat	:	Tidak Ada

## b.Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	Ya/Tdk
1.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

## C.KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
2	6105015610950001	Yenni Tresnawati	PT.BPR TRITUNGGAL	Tidak Ada	Tidak Ada

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	6105011909780003	Lukas	PT.BPR TRITUNGGAL	80 %	80 %
2	6103010806780001	Aliudin	PT.BPR TRITUNGGAL	Tidak Ada	Tidak Ada

### 3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	6105011909780003	Lukas	PT.BPR TRITUNGGAL	80 %	80 %
2	6105011190770002	Thin Sin	PT.BPR TRITUNGGAL	20 %	20 %

### D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

#### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
2	6105015610950001	Yenni Tresnawati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

#### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	6105011909780003	Lukas	-	CV SARANA MAKMUR SENTOSA	60 %
2	6105011909780003	Lukas	-	PT.TRITUNGGAL POULTRY FARM	45 %
3	6103010806780001	Aliudin	-	Tidak Ada	Tidak Ada

## E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6105015610950001	Yenni Tresnawati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

### 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6105011909780003	Lukas	Tidak Ada	Ada	Ada
2	6103010806780001	Aliudin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

### 3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6105011909780003	Lukas	Tidak Ada	Ada	Ada
2	6105011190770002	Thin Sin	Tidak Ada	Ada	Ada

## G.HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

### 1.Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6105015610950001	Yenni Tresnawati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

### 2.Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6105011909780003	Lukas	Tidak Ada	Ada	Ada
2	6103010806780001	Aliudin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

### 3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6105011909780003	Lukas	Tidak Ada	Ada	Ada
2	6105011190770002	Thin Sin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS  
YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	Rp.300.000.000	2	Rp.288.000.000
2.	Tunjangan				
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunersi lainnya				
	Total Remunerasi		Rp.300.000.000		Rp.288.000.000
	<b>Jenis Fasilitas Lain</b>				
1.	Perumahan				
2.	Transportasi				
3.	Asuransi Kesehatan				
4.	Fasilitas Lainnya				
	Total Fasilitas Lainnya				
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		Rp.300.000.000		Rp.288.000.000

## I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

### Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	8,24
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,66
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,66
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	5,32

## J. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	17/01/2025	2	Dewan Komisaris menekankan kepada Direksi untuk segera memastikan kesiapan implementasi SAKEP dan perhitungan CKPN mulai Januari 2025, termasuk kelengkapan sistem, sarana pendukung, serta metode yang sesuai. Selain itu, Direksi diminta mempercepat proses audit melalui KAP yang telah ditunjuk serta menindaklanjuti dan melaporkan kepada OJK. Terkait pengunduran diri Direktur Utama, Direksi diminta melakukan serah terima secara lengkap, memastikan tidak ada lagi akses yang tersisa, serta menyampaikan pelaporan resmi kepada OJK. Dewan Komisaris juga merekomendasikan pengisian jabatan Direktur Utama dan mendorong pencarian kandidat untuk posisi Direksi yang masih kosong. Selanjutnya, Direksi diminta menyelesaikan pelanggaran BMPK sesuai batas waktu, mensosialisasikan rencana bisnis ke seluruh organisasi, serta secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan internal maupun eksternal, khususnya yang diselenggarakan oleh OJK dan Perbarindo Kalbar-Kalteng.

2	23/06/2025	2	Direksi diminta segera melengkapi kekosongan SDM (termasuk PE Audit Internal dan Direktur Operasional), menyelesaikan pelanggaran BMPK sesuai komitmen dengan OJK, serta meningkatkan penghimpunan dana dan kualitas kredit dengan prinsip kehati-hatian untuk menekan NPL.Selain itu Direksi agar memenuhi kewajiban SLIK, menindaklanjuti hasil audit dan pengawasan 2024, menyusun program literasi keuangan semester II 2025, serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan.
3	29/09/2025	2	Direksi diminta melengkapi SDM sesuai struktur organisasi, termasuk pengisian posisi PE Audit Internal dan penggantian staf penagihan dengan pelatihan yang memadai guna mendukung kinerja BPR yang sehat. Direksi juga diingatkan untuk menghindari pelanggaran BMPK, meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit, serta menjaga kualitas aset.Selain itu, Direksi diminta menyiapkan proses pemenuhan Direktur Kepatuhan, menyusun dan menyampaikan rencana kerja 2026 kepada Dewan Komisaris, serta memperkuat permodalan melalui optimalisasi laba dan aspek perpajakan. Direksi juga didorong meningkatkan penghimpunan dana, termasuk melalui program internal, serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan internal dan eksternal.
4	27/11/2025	2	Direksi diingatkan bahwa pemberian tantiem dan jasa produksi tahun 2025 bergantung pada pencapaian target NPL, sehingga diminta fokus pada penyelesaian kredit bermasalah dan pencapaian rencana kerja. Direksi juga diminta memastikan pemenuhan seluruh komitmen hasil pemeriksaan OJK tepat waktu.Selain itu, Direksi diminta meningkatkan kehati-hatian penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak ketiga, serta penguatan manajemen risiko melalui pemantauan dan pelaporan rutin. Proses rekrutmen dan evaluasi karyawan perlu diperkuat melalui pengecekan data IDEB.Direksi juga diminta menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja semester II 2025, menindaklanjuti penggunaan jasa KAP untuk audit 2025, memastikan perhitungan imbalan pascakerja, serta segera mengisi kekosongan jabatan (Direktur Operasional dan PE Audit Internal) dan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan.

## K. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	6105011909780003	Lukas	4	-	100 %
2.	6103010806780001	Aliudin	4	-	100%

## L. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
<b>Total Fraud</b>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<b>Telah Diselesaikan</b>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<b>Dalam Proses Peyelesaian</b>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<b>Belum Diupayakan Penyelesaiannya</b>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<b>Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum</b>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

## M. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Tidak Ada	Tidak Ada
Dalam Proses Penyelesaian	2	Tidak Ada
Total	2	Tidak Ada

## N. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
TIDAK ADA									

## O. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/ NPWP	Jumlah (Rp)
1	21/07/2025	Kegiatan Sosial	Kegiatan Bupati Cup Sintang 2025 merupakan turnamen tenis lapangan yang diikuti instansi pemerintah dan swasta se-Kabupaten Sintang. BPR Tritunggal direkomendasikan berpartisipasi sebagai sponsor sebesar Rp5.000.000,- sebagai bentuk dukungan sekaligus meningkatkan branding dan eksposur. Melalui sponsorship ini, BPR Tritunggal memperoleh manfaat berupa pencantuman logo pada media publikasi, kesempatan promosi produk, serta keterlibatan dalam pemberian hadiah kepada pemenang.	Panitia Penyelenggara Bupati Cup Sintang 2025	-	Rp.5.000.000,-
2	29/07/2025	Kegiatan Sosial	Kegiatan Kapuas Raya Singing Festival Vol.1 2025 merupakan ajang lomba menyanyi Dangdut dan Pop yang terbuka untuk masyarakat umum, diselenggarakan pada 14-16 Agustus 2025 di Hermes Sky Garden, Sintang. BPR Tritunggal direkomendasikan berpartisipasi sebagai sponsor sebesar Rp1.000.000,- sebagai bentuk dukungan sekaligus meningkatkan branding. Manfaat yang diperoleh meliputi pencantuman logo di media promosi, penyebutan oleh MC, fasilitas stand, serta kesempatan promosi produk kepada peserta dan pengunjung.	Panitia Penyelenggara Kapuas Raya Singing Festival Vol.1	-	Rp.1.000.000

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/ NPWP	Jumlah (Rp)
3	31/07/2025	Kegiatan Sosial	Kegiatan Kejuaraan Provinsi Motoprix Kalimantan Barat Seri 3 merupakan ajang balap motor yang terbuka untuk umum, dilaksanakan pada 23-24 Agustus 2025 di Sirkuit Ex Bandara Susilo Sintang. BPR Tritunggal direkomendasikan berpartisipasi sebagai sponsor sebesar Rp3.000.000,- sebagai bentuk dukungan serta peningkatan branding. Manfaat yang diperoleh meliputi pencantuman logo di seluruh media promosi, penyebutan oleh MC, serta fasilitas stand area untuk kegiatan promosi.	Panitia Kejuaraan Provinsi Motoprix-Kalimantan Barat-Seri 3	-	Rp.3.000.000
4	13/08/2025	Kegiatan Sosial	Panitia HUT ke-80 Kemerdekaan RI Kecamatan Kayan Hilir mengajukan permohonan sponsorship untuk mendukung berbagai kegiatan lomba masyarakat selama Agustus 2025. BPR Tritunggal direkomendasikan berpartisipasi sebagai sponsor sebesar Rp1.000.000,- sebagai bentuk dukungan dan peningkatan branding, dengan manfaat pencantuman logo pada media publikasi serta penyebutan sebagai sponsor resmi.	Kecamatan Kayan Hilir		Rp.1.000.000
5	17/10/2025	Kegiatan Sosial	Turnamen Futsal Nanga Mau-Kayan Hilir direncanakan sebagai sarana promosi dan peningkatan brand awareness BPR Tritunggal, khususnya dalam rangka rencana pembukaan Kantor Kas di wilayah tersebut. Kegiatan akan dilaksanakan pada 1-15 November 2025 di Lapangan Futsal Omega Nanga Mau, dengan peserta masyarakat umum. BPR Tritunggal direkomendasikan memberikan sponsorship sebesar Rp7.000.000,- guna mendukung kegiatan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat setempat.	Panitia Turnamen Futsal Nanga Mau-Kayan Hilir		Rp.7.000.000

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/ NPWP	Jumlah (Rp)
6	29/10/2025	Kegiatan Sosial	BPR Tritunggal diajukan untuk berpartisipasi sebagai sponsor dalam kegiatan Pentahbisan Imam Baru Keuskupan Sintang yang akan dilaksanakan pada 29 Oktober 2025 di Gereja Katedral Kristus Raja Sintang. Partisipasi berupa bantuan dana sebesar Rp1.500.000,- sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan serta upaya mempererat hubungan dengan masyarakat dan tokoh keagamaan setempat.	Gereja Katedral Kristus Raja Sintang.		Rp.1.500.000

Sintang, 24 April 2026

PT. BPR Tritunggal



Yenni Tresnawati  
Direktur Utama




Lukas  
Komisaris Utama